



Sekolah 5 Hari Ditangguhkan

JAKARTA—Presiden Joko Widodo menganulir Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.23/2017 tentang Hari Sekolah yang menjadi beleid sekolah lima hari dalam sepekan.

Arys Aditya & Sunartono
redaksi@binews.co

Sebagai gantinya, Jokowi bakal mengeluarkan Peraturan Presiden yang akan memayungi jadwal baru persekolahan. Ekses dari kebijakan yang diambil Jokowi adalah sekolah lima hari dalam sepekan dengan delapan jam pembelajaran per hari kemungkinan urung dimulai pada tahun ajaran 2017/2018. Belum jelas kapan dan bagaimana bentuk sistem anyar itu akan mulai diberlakukan.

Jokowi membatalkan Permendikbud tentang Hari Sekolah setelah memanggil Mendikbud Muhadjir Effendy dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin di Kantor Presiden, Senin (19/6).

"Presiden akan menata ulang regulasi itu sehingga Peraturan Menteri akan menjadi Peraturan Presiden," ujar Ma'ruf.

Muhadjir melontarkan rencana menerapkan sistem lima hari sekolah pada awal bulan ini. Ide tersebut disambut negatif banyak kalangan. MUI dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menentang rencana itu. Sebab, dengan bersekolah lima hari, siswa dari jenjang SD sampai SMA harus mengikuti proses pembelajaran selama delapan jam per hari. Akibatnya, lembaga pendidikan nonformal seperti madrasah diniyah bakal gulung tikar. Santri di madrasah diniyah tidak akan punya waktu untuk mengaji dan belajar di institusi pendidikan keagamaan tersebut.

- ▶ Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan Jokowi sebenarnya sudah menyetujui sekolah lima hari.
- ▶ Peraturan Presiden akan mengatur integrasi madrasah diniyah dengan sekolah formal.



Ya mubazir, namanya sudah disiapkan tapi tidak jadi, tetapi ya mau bagaimana lagi. Kami ini tinggal melaksanakan. Kalau peraturannya dijalankan kami siap melaksanakan. Kalau peraturannya dibatalkan, kami akan mengikuti."

Kadarmanta Baskara Aji
Kepala Disdikpora DIY

Instansi
1. <u>Dit. pendidikan</u>
2.
3.
4.
5.

● Lebih Lengkap Halaman 8

Netral Yogyakarta

Sekolah 5 Hari...

Selama ini, jam belajar di madrasah diniyah umumnya berlangsung sore hari. Sementara, dengan delapan jam belajar per hari, siswa akan berada di sekolah dari pagi sampai sore.

Belakangan, MUI berubah haluan setelah Ma'ruf Amin bertemu dengan Muhadjir Effendy. Muhadjir menjelaskan bahwa pembelajaran di madrasah diniyah akan diintegrasikan dengan sekolah formal dan jam belajar di lembaga tersebut bakal dihitung dalam sistem delapan jam sekolah per hari.

Ma'ruf Amin mendukung gagasan itu dan menyebutnya sebagai metode pembelajaran yang bagus untuk menguatkan karakter generasi muda Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi. Namun, penentangan terhadap ide Muhadjir tak surut.

Sejumlah kalangan tetap menolak dengan berbagai alasan, seperti infrastruktur beberapa sekolah yang kurang memadai, sarana transportasi yang bisa menyulitkan sekolah yang pulang sore, sampai bekal murid yang akan tambah banyak karena harus makan siang di sekolah.

Menurut Ma'ruf Amin, Perpres tentang Hari Sekolah segera dikeluarkan untuk meredakan polemik yang kadung berkembang. Beleid itu akan disusun bersama Mendikbud Muhadjir, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, MUI, PBNU, dan PP Muhammadiyah.

Perpres bakal mengatur secara detail penguatan terhadap madrasah diniyah dan pondok pesantren, terutama untuk menangkal kemungkinan berkembangnya radikalisme dan terorisme. Regulasi baru tersebut diharapkan lebih komprehensif dan menampung aspirasi yang berkembang.

Menurut Ma'ruf, proses pengeluaaran Perpres akan cepat, sehingga Per-

mendikbud No.23/2017 tidak akan diberlakukan.

Sementara itu, Muhadjir Effendy enggan disalahkan. Dia mengaku tak akan bertindak di luar izin Jokowi. Menurut Permendikbud No.23/2017 tentang Hari Sekolah diteken berdasarkan persetujuan Presiden Jokowi. Persetujuan tersebut, didapatkan dalam Rapat Terbatas (Ratas) bertema *Tindak Lanjut Nation Branding* pada 3 Februari 2017 lalu.

"Jadi, saya mau klarifikasi. Saya tidak bergerak sendiri dalam menerbitkan aturan (lima hari sekolah) itu. Kebijakan itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden," ujar dia.

Dia juga membacakan risalah ratas yang diteken oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Menurut catatan tersebut, "Presiden menyetujui usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait upaya menyinkronkan libur sekolah dengan libur pegawai, sehingga hari Sabtu dan Minggu dapat digunakan sebagai waktu berlibur masyarakat untuk menikmati kekayaan budaya dan alam Indonesia. Oleh karena itu, hal tersebut agar ditindaklanjuti."

Kebijakan lima hari sekolah ini dibuat dengan menyesuaikan Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2017 tentang Beban Tugas Guru. Kebijakan itu mengatur beban kerja guru adalah 40 jam dalam sepekan. Agar beban jam mengajar itu terpenuhi, siswa akan diminta bersekolah delapan jam per hari sehingga hanya cukup masuk sekolah lima hari dalam sepekan.

Jika tak memancing kontroversi seperti sekarang ini, penjadwalan baru itu akan mulai berlaku bulan depan, bersamaan dengan tahun ajaran baru SD, SMP, SMA dan sederajat.

Pembatalan Permendikbud No.23/2017 menyebabkan sejumlah persiapan oleh beberapa sekolah di DIY untuk menerapkan lima hari sekolah sia-sia.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Kadamanta Baskara Aji mengatakan sudah banyak sekolah negeri yang bersiap menyusun jadwal baru. Dengan penangguhan lima hari sekolah, kata Baskara Aji, persiapan itu pun sia-sia.

"Ya mubazir, namanya sudah disiapkan tapi tidak jadi, tetapi ya mau bagaimana lagi. Kami ini tinggal melaksanakan. Kalau peraturannya dijalankan kami siap melaksanakan. Kalau peraturannya dibatalkan, kami akan mengikuti," ujar Aji saat dimintai konfirmasi melalui sambungan telepon, Senin.

Disdikpora DIY sebenarnya berencana menerapkan lima hari sekolah secara menyeluruh di semua wilayah. Sekolah yang belum siap diminta mengajukan dispensasi dan jadwal baru akan diterapkan secara bertahap.

Menurut Baskara Aji, sudah banyak sekolah yang menerapkan lima hari sekolah, semuanya sekolah swasta.

Aji mengimbau guru dan kepala sekolah yang telanjur merancang jadwal untuk lima hari sekolah tetap bersabar.

"Ikuti saja perkembangannya seperti apa. Sekolah yang sudah melaksanakan lima hari sekolah kalau memang nanti (di peraturan baru) ada larangan ya berarti jangan melaksanakan," kata dia.

"Kalau aturannya dibatalkan [Permen] kan berarti tidak ada larangan melaksanakan lima hari, yang melaksanakan enam hari juga tidak salah. Kami tunggu saja turunnya Peraturan Presiden."

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005